

ANALYSIS OF THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL REVENUE, GENERAL ALLOCATION FUNDS, AND REVENUE SHARING FUNDS ON REGIONAL EXPENDITURE OF REGENCY/CITY GOVERNMENTS IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Yuliana¹, Baiq Saripta Wijimulawiani², M. Jumaedi³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, NTB^{1,2,3}

ana680899@gmail.com¹, baiqsariptaw@unram.ac.id², m.jumaedi@staff.unram.ac.id³

ABSTRACT

Regional expenditure is all expenditure that results in a reduction in the net wealth of the regional government, which is used to meet various regional obligations in a given budget period. The sources of funding for Regional Expenditure are obtained from Regional Original Revenue, General Allocation Funds, and Revenue Sharing Funds. This study aims to analyze the effect of Regional Original Revenue, General Allocation Funds, and Revenue Sharing Funds on Regional Expenditure of the regencies/cities in West Nusa Tenggara Province for the period 2017-2024. This study utilizes a quantitative method with panel data regression analysis using EViews 12 software. The population is all regencies/cities in NTB Province, with a total of 80 observations using saturated sampling technique. The data used is panel data in the form of secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The results of the study show that partially, PAD and DAU positively and significantly affect Regional Expenditure, while DBH does not significantly affect Regional Expenditure. However, simultaneously, PAD, DAU, and DBH positively and significantly affect Regional Expenditure of the Regency/City Government of West Nusa Tenggara Province (2017-2024).

Keywords: PAD, DAU, DBH, Regional Expenditur

ABSTRAK

Belanja Daerah adalah seluruh pengeluaran yang mengakibatkan berkurangnya kekayaan bersih pemerintah daerah, yang dimanfaatkan guna mencukupi berbagai kewajiban daerah pada satu periode anggaran tertentu. Sumber pendanaan Belanja Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pemerintah Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun (2017-2024). Kajian ini memanfaatkan metode kuantitatif dengan analisis regresi data panel dengan aplikasi EViews 12. Populasi yang ditetapkan ialah keseluruhan kabupaten/kota Provinsi NTB, dengan total 80 observasi menggunakan teknik sampling jenuh. Data yang dimanfaatkan ialah data panel berupa data sekunder yang didapat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara parsial PAD dan DAU positif dan signifikan memengaruhi Belanja Daerah, DBH tidak signifikan memengaruhi Belanja Daerah. Tetapi, secara simultan PAD, DAU, dan DBH positif dan signifikan memengaruhi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun (2017-2024).

Kata Kunci: PAD, DAU, DBH, Belanja Daerah

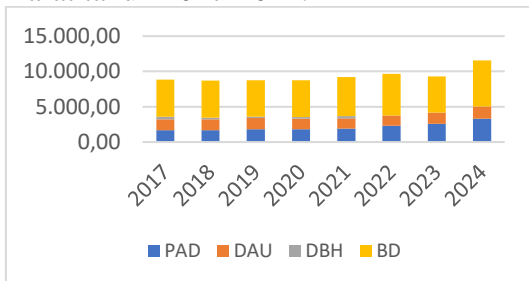
PENDAHULUAN

Sejak UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disahkan, Indonesia mulai menerapkan sistem otonomi daerah secara formal. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus berbagai urusan internalnya dengan

lebih mandiri. Kewenangan tersebut mencakup pengelolaan belanja daerah serta penatausahaan pendapatan daerah (Priambodo & Hidayat, 2024).

Keberhasilan suatu daerah saat melaksanakan otonomi daerah dapat menghasilkan pengaruh yang sangat positif terhadap perekonomian daerah. melalui otonomi ini, pemerintah daerah

memiliki kesempatan dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada, yang dapat menjadi sumber utama dalam membiayai berbagai program dan kegiatan daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran belanja secara efisien demi memenuhi kebutuhan layanan publik. Tingkat kemandirian daerah dapat dievaluasi melalui besaran Pendapatan Asli Daerah yang berhasil dihasilkan dalam mencukupi kebutuhan Belanja Daerah. Akan tetapi, hingga kini, pemerintah daerah mayoritasnya masih bergantung pada suntikan anggaran pemerintah pusat termasuk NTB, transfer anggaran dari pemerintah pusat mencakup Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sangat penting dalam membiayai Belanja Daerah (Rafi & Arza, 2023). Gambar berikut menunjukkan perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017-2024.

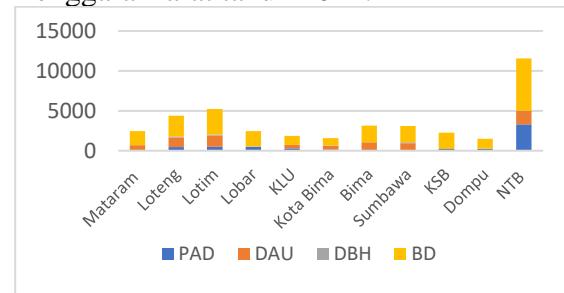


Gambar 1. Perkembangan Realisasi PAD, DAU, DBH, dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2024

Sumber: DJPK, 2025 (data diolah)

Pada gambar 1, PAD menunjukkan tren peningkatan yang relatif konsisten dan signifikan dari tahun 2017-2024, dan terjadi lonjakan pada tahun 2023 dan 2024, yang menunjukkan kemandirian fiskal daerah. Disisi lain DAU cenderung stabil namun sedikit mengalami fluktuatif, sebelum

naik signifikan pada tahun 2023 dan 2024, sementara DBH memiliki tren paling fluktuatif. Pada periode pandemi (2020-2022), Belanja Daerah tetap mengalami peningkatan walaupun sempat turun pada tahun 2023, penurunan ini merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan umum dan prioritas anggaran pemerintah daerah untuk menstabilkan keuangan di tengah tantangan ekonomi dan pergeseran kebutuhan fiskal setelah pandemi. Dan setelah itu melonjak drastis pada tahun 2024. Hal tersebut didukung oleh kenaikan PAD dan DAU, secara keseluruhan peningkatan (PAD, DAU, DBH) berkorelasi positif untuk pembiayaan Belanja Daerah provinsi NTB. Gambar berikut menampilkan realisasi PAD, DAU, DBH, serta Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024.



Gambar 2. Realisasi PAD, DAU, DBH, dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

Sumber: DJPK, 2025 (data diolah)

Pada Gambar 2, menunjukkan bahwa Kota Mataram memberikan sumbangsih terbesar terhadap PAD Provinsi NTB yang merupakan bagian signifikan dari total PAD provinsi NTB. Sementara itu, untuk DAU daerah dengan alokasi terbesar adalah Lombok Timur dan kabupaten ini juga memiliki realisasi Belanja Daerah tertinggi. Maka, ditarik simpulan bahwa Kota Mataram serta Lombok Timur adalah dua daerah yang memberikan sumbangsih paling besar terhadap keuangan maupun

Belanja Daerah di Provinsi NTB pada tahun 2024.

Belanja daerah adalah seluruh pengeluaran yang mengakibatkan berkurangnya kekayaan bersih pemerintah daerah, yang dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kewajiban daerah pada satu periode anggaran tertentu. Belanja Daerah menjadi satu dari sekian komponen utama dalam mengelola anggaran daerah, dengan peran strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sumber pendanaan utama Belanja Daerah diperoleh dari berbagai komponen yang meliputi PAD, DAU dan DBH (Sabrina & Widajantie, 2023).

Berdasarkan teori Federalisme Fiskal dan Desentralisasi Fiskal menyatakan bahwa desentralisasi fiskal pada dasarnya mencakup kewenangan daerah dalam menggali sumber pendapatan, menerima transfer dana, serta mengelola belanja daerah. Teori ini mengindikasikan bahwa PAD berfungsi sebagai ukuran kemandirian fiskal daerah, dimana semakin besar kontribusinya terhadap APBD, menghasilkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Namun, PAD saja tidak cukup sehingga transfer pusat berupa DAU dan DBH tetap diperlukan. Secara umum teori ini memperlihatkan adanya pengaruh PAD, DAU dan DBH secara signifikan terhadap Belanja Daerah (Bahasoan dkk., 2025; Rahmatul Putra dkk., 2023).

Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dijalankan Fadilah & Helmayunita (2020), Adnan dkk (2025), Halimah dkk (2025), Hutagalung dkk (2024), Septriani (2023), serta Wulandari dkk (2023) yang memperlihatkan bahwa Belanja Daerah dipengaruhi secara positif serta

signifikan oleh variabel PAD, DAU, serta DBH. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal daerah serta alokasi umum dari pemerintah pusat berperan penting dalam menentukan besaran Belanja Daerah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Jannah & Trisnaningsih (2022) menyebutkan bahwa secara parsial, DBH serta DAU tidak memengaruhi Belanja Daerah Handayani dkk (2022), menunjukkan temuan bahwa PAD serta DBH tidak signifikan memengaruhi Belanja Daerah.

Penelitian terdahulu seringkali memperlihatkan temuan yang bervariasi serta tidak senantiasa saling sejalan. Disamping itu banyak penelitian yang menerapkan konsep tanpa dasar teori, sehingga menghasilkan ketidaksesuaian dalam hasil yang diperoleh. Situasi ini memotivasi penulis untuk melakukan evaluasi dan pengujian ulang mengenai pengaruh PAD, DAU, serta DBH terhadap Belanja Daerah, dengan menjadikan Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi lokasi penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Federalisme Fiskal dan Desentralisasi Fiskal

Dalam buku “Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia” Puspita et al (2021:7) mengungkapkan bahwa, Teori Federalisme Fiskal terdapat dua perspektif: teori generasi pertama (teori tradisional) dari Samuelson (1954, 1955) yang mengkaji karakteristik dasar barang publik, Musgrave (1959) mengenai fungsi anggaran publik terkait intervensi pemerintah, dan Arrow & Lind (1970) tentang fungsi sektor publik dan swasta; Sedangkan teori generasi kedua (teori perspektif baru) dari Musgrave (1959) dan Oates (1972) menegaskan bagaimana krusialnya pemisahan wewenang dalam

pengelolaan penerimaan serta pengeluaran antar tingkat pemerintah.

Dalam buku “Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia” Puspita et al (2021:8) mengungkapkan bahwa, menurut Litvack dan Seddon (1998), desentralisasi fiskal dapat diimplementasikan melalui tiga pendekatan: (i) pendekatan penerimaan, yang memberi kewenangan pemerintah daerah untuk mengalih sumber penerimaan sesuai ketentuan, memperoleh bagian dari penerimaan pusat yang bersumber dari daerah, serta menerima transfer dana guna mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah; (ii) pendekatan pengeluaran, yang mencakup wewenang daerah dalam mengelola belanja daerah yang didanai oleh mayoritas ataupun sebagian dari sumber selain penerimaan asli daerah; (iii) pendekatan komprehensif, yang menyelaraskan potensi penerimaan dengan kebutuhan pengeluaran, sehingga kewenangan penerimaan dan pengeluaran diserahkan secara bersamaan kepada daerah.

Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa pemerintah cenderung meningkatkan pengeluaran seiring dengan penerimaan pajak. Kenaikan pajak akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang berimplikasi pada peningkatan pengeluaran pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan Belanja Daerah (Ridwan & Nawir, 2021:74). Tujuan pengeluaran pemerintah tidak hanya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang memenuhi standar (Desipradani &

Sucipto, 2024; Irfan Hamdani et al., 2023).

Konsep Flypaper Effect

Flypaper Effect adalah kondisi dimana dana perimbangan seperti: (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) lebih kuat mendorong peningkatan Belanja Daerah dibandingkan dengan PAD (Fadilah & Helmayunita, 2020).

Belanja Daerah

Sebagaimana tercantum pada UU No. 33 tahun 2004, belanja daerah menjadi kewajiban daerah yang menyebabkan penurunan nilai kekayaan bersih yang dimiliki pada tahun anggaran tertentu (Roskaputri dkk., 2024). Belanja daerah mencakup dana yang dikeluarkan untuk penyediaan layanan serta barang publik bagi masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Jung & Kim, 2024). Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai pengelolaan fungsi pemerintahan dalam lingkup pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Pengeluaran ini mencakup urusan wajib, urusan pilihan, hingga urusan tertentu yang dijalankan dengan kolaboratif sesuai peraturan perundang-undangan (Rahula & Bowo, 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merujuk pada penerimaan yang secara langsung didapatkan serta dikumpulkan pemerintah daerah (Wardia dkk., 2024). PAD ialah penerimaan daerah yang dihimpun melalui retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan BUMD, pemanfaatan aset daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. PAD dimaksudkan guna membebaskan wewenang bagi pemerintah dalam mendanai otonomi daerahnya dengan pemanfaatan kekayaan daerah sebagai

bentuk desentralisasi (Darmayanti dkk., 2022).

Dana Alokasi Umum (DAU)

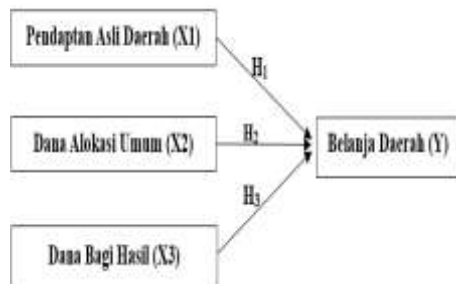
Sebagaimana tercantum pada UU No. 33 Tahun 2004, “Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Sebagaimana tercantum pada UU No. 33 Tahun 2004, “Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Kerangka konseptual

Kerangka konseptual pada penelitian ini difokuskan pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah, selaras dengan judul penelitian yang mengkaji tentang “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Maka untuk memudahkan penelitian ini, penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang didapat akan mempengaruhi jumlah pengeluaran Belanja Daerah. Maka, ketika PAD memperlihatkan kenaikan, kemampuan daerah dalam melaksanakan pengeluaran Belanja Daerah juga dapat memperlihatkan peningkatan (Fatimah dkk., 2020).

Penelitian tentang PAD yang positif dan signifikan memengaruhi Belanja Daerah telah dilakukan sebelumnya oleh Azizah dkk (2022), Juwari dkk (2021), Fajriati dkk (2021), Rohan & Asoka (2021), Ariska dkk (2022), serta Dahliah (2022). Sebagaimana paparan tersebut, selanjutnya dirumuskan hipotesis berikut:

H1: “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah”.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum ialah anggaran yang disumbangkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memenuhi keperluan daerah sebagai komponen belanja daerah. Dengan demikian, peningkatan DAU kemudian diikuti dengan meningkatnya Belanja Daerah (Rafi & Arza, 2023).

Penelitian terdahulu tentang DAU yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dijalankan oleh Yenada & Muslimin (2024), Kustianingsih dkk (2022), dan Mahyu & Andriyani (2020), dan Iqbal dkk (2020). Sebagaimana paparan tersebut, selanjutnya dirumuskan hipotesis berikut:

H2: “Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah”.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Daerah

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah satu dari sekian sumber perolehan daerah yang berpotensi besar serta berfungsi sebagai modal dasar yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam memperoleh anggaran pembangunan maupun mencukupi Belanja Daerah yang tidak diperoleh melalui PAD (Safa'ah dkk., 2021).

Penelitian terkait DBH yang positif dan signifikan memengaruhi Belanja Daerah telah dilakukan oleh Paraswati dkk (2024), Wulandari dkk (2023) dan Safa'ah dkk (2021). Sebagaimana paparan tersebut, selanjutnya disusun hipotesis berikut:

H₃: “Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Studi ini menetapkan kuantitatif sebagai pendekatannya, sebagaimana Sugiyono (2020:16) menyebutnya sebagai “metode tradisional” karena telah diterapkan dalam waktu yang lama dan telah menjadi tradisi dalam dunia penelitian. Menurut Purnomo (2024:105), metode kuantitatif adalah pendekatan yang berfokus pada pengumpulan serta analisis data numerik untuk menguji hipotesis melalui pengukuran variabel dan analisis statistik. Metode ini bertujuan memperoleh generalisasi dari sampel ke populasi yang lebih luas.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2020:126), mengungkapkan bahwa populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan jumlah dan karakteristik khusus yang peneliti tetapkan sebagai fokus penelitian saat penarikan

kesimpulan. Pada kajian ini, Populasi mencakup keseluruhan kabupaten/kota provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2017-2024, meliputi 10 kabupaten/kota sehingga total populasi senilai 80. Dalam menetapkan sampel, teknik yang dimanfaatkan ialah sampling jenuh, yakni keseluruhan populasi ditetapkan sebagai sampel.

Data dan Sumber Data

Kajian ini memanfaatkan data sekunder yang berbentuk data panel (*Cross-Section & Time-Series*). Data yang digunakan meliputi PAD, DAU, DBH, dan Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2017-2024. Seluruh data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk, 2025).

Definisi Operasional Variabel

Purnasari (2022), mengungkapkan bahwa Definisi operasional variabel adalah penyusunan identitas ideal dan relevan untuk mengukur nilai variable. Dalam kajian ini, satu variabel dependen serta tiga variabel independen dimanfaatkan, yakni:

1. Belanja Daerah (Y): total pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD untuk pembangunan dan pelayanan public, yang diukur dengan satuan (Miliar Rp).
2. PAD (X1): pendapatan daerah dari pajak dan retribusi, yang diukur dengan satuan (Miliar Rp).
3. DAU (X2): dana transfer pusat bagi pemerataan kemampuan fiskal daerah, yang diukur dengan satuan (Miliar Rp).
4. DBH (X3): dana APBN yang dialokasikan berdasarkan penerimaan pajak serta sumber daya alam, yang diukur dengan satuan (Miliar Rp).

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan aplikasi EViews 12 dalam menganalisa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya, dengan model persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Belanja Daerah
- α = Konstanta
- β_1 - β_3 = Koefisien Regresi
- X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X2 = Dana Alokasi Umum (DAU)
- X3 = Dana Bagi Hasil (DBH)
- e = error term

Analisis regresi untuk data panel dilakukan dengan tiga model: *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, serta *Random Effect Model (REM)*. Menurut Jumaedi & Adha (2025), Uji seleksi model dilakukan dalam menentukan model yang lebih sesuai, yakni:

1. Uji Chow: memperbandingkan *CEM* dengan *FEM*. Ketika probabilita < 0,05 artinya *FEM* merupakan model terbaik.
2. Uji Hausman: memperbandingkan *FEM* dengan *REM*. Jika probabilita < 0,05 artinya *FEM* merupakan model terbaik.
3. Uji Lagrange Multiplier (LM): memperbandingkan *REM* dengan *CEM*. Jika probabilita < 0,05 artinya *REM* merupakan model terbaik.

Selanjutnya, akan dilakukan pengujian asumsi klasik. Menurut Irfan Syahroni (2023), Uji Asumsi Klasik mencakup: pengujian Normalitas, Multikolinieritas, serta Heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas: pendistribusian data dinilai normal ketika probabilita > 0,05.

2. Uji Multikolinieritas: multikolinieritas tidak terjadi ketika taraf korelasi < 0,85.

3. Uji Heteroskedastisitas: tidak terjadi masalah heteroskedastisitas ketika Prob. > 0,05.

Selanjutnya pengujian hipotesis dijalankan melalui Uji T, Uji F, serta Koefisien Determinasi (R²). Sesuai dengan pernyataan (Mursyidin et al., 2023).

1. Uji Parsial (uji statistik T): berpengaruh secara parsial ketika nilai Prob. < 0,05.
2. Uji Simultan (uji statistik F): berpengaruh secara simultan ketika nilai Prob. < 0,05.
3. Koefisien Determinasi (R²): untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Data Panel

1. Uji Chow

Pengujian chow ialah tahap dalam menetapkan model regresi data panel yang lebih sesuai. Menurut Madany & Rais (2022), pengujian chow dimaksudkan guna menentukan model terbaik diantara *CEM* & *FEM* dengan membandingkan nilai probabilitas p ada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05). Hipotesis yang dirumuskan ialah:

H₀ : Common Effect Model (CEM)

H_a : Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.544844	(9,67)	0.0000
Cross-section Chi-square	50.465913	9	0.0000

Sumber: pengolahan data (Eviews 12)

Perolehan uji chow memperlihatkan Cross-section Chi-square (50.465913) dengan probabilitas 0.0000 yang lebih kecil dari 0,05 artinya H₀ tertolak

sementara H_a diterima. Maka, *FEM* merupakan model terbaik.

2. Uji Hausman

Rahayu (2023), mengungkapkan bahwa uji hausman dimaksudkan guna memastikan model yang lebih sesuai antara *FEM* dan *REM* dengan membandingkan nilai probabilitas pada taraf Sig. $\alpha = 5\%$ (0,05). Hipotesis yang dirumuskan ialah:
 H_0 : Random Effect Model (REM)
 H_a : Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.590418	3	0.0005

Sumber: pengolahan data (Eviews 12)

Perolehan pengujian uji hausman menampilkan nilai Cross-section random (17.590418) dengan nilai probabilitas 0.0005 lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Itu artinya, *Fixed Effect Model (FEM)* dianggap sebagai model terbaik. Karena *FEM* yang terpilih sebagai model terbaik dari hasil pengujian chow serta hausman, maka pengujian *Lagrange Multiplier (LM)* tidak wajib dilakukan (Salsabila dkk., 2022).

Analisis Regresi dengan Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan estimasi Fixed Effect Model pada penelitian ini ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi dengan Estimasi FEM

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 09/24/25 Time: 10:46
 Sample: 2017 2024
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	645.7154	236.3619	2.731893	0.0080
X1	0.997787	0.402192	2.480876	0.0156
X2	0.983468	0.396494	2.480409	0.0156
X3	0.212505	0.133528	1.591460	0.1162

Sumber: pengolahan data (Eviews 12)

Berdasarkan hasil koefisien yang dihasilkan dari analisis regresi data panel dengan estimasi *Fixed Effect Model (FEM)*, maka dapat disusun model persamaan sebagai berikut:

$$Y = 645.7154 + 0.997787 X_1 + 0.983468 X_2 + 0.212505 X_3 + e$$

Model tersebut menunjukkan bahwa:

- Nilai konstanta pada hasil analisis sebesar 645.7154 Miliar Rp, dengan asumsi PAD (X1), DAU (X2), dan DBH (X3) adalah sebesar nol (0) maka akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 645.7154 Miliar Rp.
- Nilai koefisien PAD (X1) sebesar 0.997787 Miliar Rp, maka setiap kenaikan satu Miliar Rp dari PAD akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0.997787 Miliar Rp.
- Nilai koefisien DAU (X2) sebesar 0.983468 Miliar Rp, maka setiap kenaikan satu Miliar Rp dari DAU akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0.983468 Miliar Rp.
- Nilai koefisien DBH (X3) sebesar 0.212505 Miliar Rp, maka setiap kenaikan satu Miliar Rp dari DBH akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0.212505 Miliar Rp.

Uji Asumsi Klasik

Pada pengujian asumsi klasik mencakup: pengujian normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta pengujian autokorelasi. Namun, menurut Awaludin dkk (2023), pada analisis data panel, pelaksanaan pengujian autokorelasi tidak wajib, sebab hanya relevan dengan data time-series, sedangkan data panel berbentuk cros section dan time series. Uji normalitas juga tidak bersifat mutlak sebagai persyaratan yang harus dipenuhi.

Pada kajian ini, model terbaik yang diidentifikasi ialah *Fixed Effect Model (FEM)*. Maka, pengujian asumsi klasik yang dilakukan adalah pengujian

multikolinearitas serta heteroskedastisitas sesuai dengan pernyataan (Apriliansi & Sudjana, 2023). Berikut ialah hasil pengujian asumsi klasik:

1. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dijalankan saat penelitian memanfaatkan lebih dari satu variabel bebas. Pengujian ini dimaksudkan guna mengamati hubungan ataupun korelasi antar variabel. Dengan ketentuan nilai correlation < 0.85 maka tidak terjadi multikoleniaritas (Basuki & Prawoto, 2023).

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.517851	-0.072828
X2	0.517851	1.000000	-0.190540
X3	-0.072828	-0.190540	1.000000

Sumber: pengolahan data (Eviews 12)

Perolehan uji multikoleniaritas menunjukkan nilai correlation < 0.85, maka tidak terjadi masalah multikoleniaritas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dimaksudkan guna menilai perbedaan varians residu antar pengamatan dalam model regresi. Satu dari sekian metode yang dimanfaatkan dalam mengidentifikasi masalah heterokedastisitas ialah dengan pengujian Glejser. Ketika Prob. > 0,05 maka ditarik simpulan bahwa masalah heteroskedastisitas tidak terjadi. Sebaliknya, ketika Prob. < 0,05 maka hal tersebut mengindikasikan adanya masalah heteroskedastisitas (Basuki & Prawoto, 2023).

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	254.5810	149.4498	1.703455	0.0931
X1	0.429362	0.254303	1.688389	0.0960
X2	-0.368266	0.250700	-1.468948	0.1465
X3	0.062956	0.084429	0.745663	0.4585

Sumber: pengolahan data (Eviews 12)

Perolehan uji heteroskedastisitas memperlihatkan bahwa nilai Prob. > 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji Statistik T)

Uji parsial dimaksudkan guna mengidentifikasi pengaruh tiap variabel independen secara individual terhadap variabel dependennya, dengan memperbandingkan taraf probabilitas pada tingkat Sig. $\alpha = 0,05$ (Pratama dkk., 2022).

H0: Tidak memiliki pengaruh signifikan Prob. > 0,05

Ha: Memiliki pengaruh signifikan Prob. < 0,05

Tabel 6. Hasil Uji Parsial dengan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	645.7154	236.3619	2.731893	0.0080
X1	0.997787	0.402192	2.480876	0.0156
X2	0.983468	0.396494	2.480409	0.0156
X3	0.212505	0.133528	1.591460	0.1162

Sumber: pengolahan data (Eviews 12)

- variabel PAD (X1) memiliki nilai Prob. (0.0156 < 0,05), itu artinya variabel PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap variable Belanja Daerah (BD).
- Variabel DAU (X2) menghasilkan nilai Prob. (0.0156 < 0,05), itu artinya secara parsial variabel DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variable Belanja Daerah (BD).
- Variabel DBH (X3) memiliki nilai Prob. (0.1162 > 0,05), itu artinya variabel DBH tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variable Belanja Daerah (BD).

2. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini dimaksudkan guna menguji pengaruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependennya. Menurut Mursyidin dkk (2023), jika $\text{Prob}(F\text{-statistic}) < 0,05$ artinya secara simultan, variabel independen signifikan memengaruhi variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji Simultan dengan FEM

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.940703	Mean dependent var	1581.880
Adjusted R-squared	0.930083	S.D. dependent var	595.1127
S.E. of regression	157.3584	Akaike info criterion	13.10260
Sum squared resid	1659032	Schwarz criterion	13.48967
Log likelihood	-511.1038	Hannan-Quinn criter.	13.25779
F-statistic	88.57621	Durbin-Watson stat	1.653873
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: pengolahan data (Eviews 12)

Hasil pengujian memperlihatkan $\text{Prob}(F\text{-statistic})$ sebesar 0.000000 lebih kecil dari 0,05. Maka, secara simultan PAD, DAU, dan DBH positif dan signifikan memengaruhi Belanja Daerah.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur persentase sejauh mana sebuah model dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen (Arisandi, 2022).

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) dengan FEM

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.940703	Mean dependent var	1581.880
Adjusted R-squared	0.930083	S.D. dependent var	595.1127
S.E. of regression	157.3584	Akaike info criterion	13.10260
Sum squared resid	1659032	Schwarz criterion	13.48967
Log likelihood	-511.1038	Hannan-Quinn criter.	13.25779
F-statistic	88.57621	Durbin-Watson stat	1.653873
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: pengolahan data (Eviews 12)

Hasil pengujian menunjukkan nilai R-squared sebesar 0.940703, artinya 94% variasi Belanja Daerah pemerintah Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dijelaskan oleh PAD, DAU, dan DBH, sedangkan 6% sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

Hipotesis pada kajian ini mengatakan bahwa “*Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah*”. Sebagaimana hasil pengolahan serta analisis yang sudah dijalankan, terlihat bahwa H_1 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa, tingginya PAD yang dihasilkan, akan menghasilkan besarnya Belanja Daerah yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah, dapat diamati melalui nilai Coefficient (0.997787) memperlihatkan hubungan yang sangat kuat dengan Belanja Daerah. Hal tersebut juga dibuktikan melalui hasil pengujian hipotesis (uji-t) dengan nilai Prob. ($0.0156 < 0,05$), itu artinya bahwa secara parsial, variabel PAD secara positif dan signifikan memengaruhi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun (2017-2024).

Temuan ini selaras dengan temuan Juwari dkk (2021), Fajriati dkk (2021), Dahliah (2022), Ariska dkk (2022), Rohan & Asoka (2021), dan Azizah dkk (2022). Yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah

Hipotesis pada penelitian ini mengatakan bahwa “*Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah*”. Sebagaimana hasil pengolahan serta analisis yang sudah dijalankan, diidentifikasi bahwa H_2 diterima. Temuan ini memperlihatkan bahwa tingginya peningkatan DAU menghasilkan besarnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk

mengalokasikan Belanja Daerah, dapat dilihat dari nilai Coefficient (0.983468) menunjukkan hubungan yang sangat kuat dengan Belanja Daerah. Hal tersebut juga diperlihatkan melalui hasil pengujian hipotesis parsial (uji-t) dengan Prob. ($0.0156 < 0,05$), itu artinya bahwa secara parsial, variabel DAU secara positif dan signifikan memengaruhi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun (2017-2024).

Temuan ini selaras dengan beberapa kajian yang telah dijalankan Kustianingsih dkk (2022), Iqbal dkk (2020), serta Mahyu & Andriyani (2020). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Dana Alokasi Umum secara positif serta signifikan memengaruhi Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Daerah

Hipotesis pada penelitian ini mengatakan “*Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah*”. Namun merujuk pada perolehan pengolahan dan analisis yang sudah dijalankan, diidentifikasi bahwa H_3 ditolak, sebab sumbangan DBH relatif kecil terhadap Belanja Daerah, dapat diamati melalui nilai Coefficient (0.212505) menunjukkan hubungan yang lemah dengan Belanja Daerah. Hal ini juga dibuktikan melalui perolehan pengujian hipotesis parsial (uji-t) dengan Prob. ($0.1162 > 0,05$), itu artinya secara parsial variabel DBH tidak signifikan mempengaruhi variabel Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun (2017-2024).

Temuan ini tidak selaras dengan temuan yang diidentifikasi Paraswati dkk (2024) serta Safa'ah dkk (2021). Yang memperlihatkan bahwa Dana Bagi Hasil secara positif dan signifikan memengaruhi Belanja Daerah. Namun

sejalan dengan penelitian Jannah & Trisnarningsih (2022) serta Handayani dkk (2022) yang menyebutkan bahwa secara parsial, DBH tidak memengaruhi Belanja Daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Merujuk pada perolehan olah data yang dijalankan, ditarik simpulan bahwa secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun (2017-2024). Sedangkan variable Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun (2017-2024). Namun secara simultan variabel PAD, DAU, serta DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun (2017-2024). Dengan kontribusi 94% terhadap Belanja Daerah.

Kelebihan peneliian ini terletak pada data time series yang relative panjang yaitu sebanyak 8 tahun mencakup seluruh Kabupaten/kota Provinsi NTB, serta penerapan dasar teori sebagai landasan analisis. Sedangkan kekurangan pada penelitian ini adalah masih terdapat 6% dari variable lain yang mempengaruhi Belanja Daerah, yang perlu di pertimbangkan oleh peneliti selanjutnya.

Berdasarkan kesimpulan di atas diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel independen guna menghasilkan temuan yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, M., Sriningsih, S., & Wafiq, A. Z. (2025). Faktor-Faktor Yang

- Mempengaruhi Belanja Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *EKONOBIS*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ekonobis.v11i2.245>
- Apriliani, D., & Sudjana. (2023). Analisis Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat 2017-2021. *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(1), 39–50.
- Arisandi, B. (2022). Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa. *Journal of Finance and Business Digital*, 1(3), 171–182. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i3.1183>
- Ariska, M., Yani, R., & Mardhani, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 6(2), 121–128. <https://doi.org/10.33059/jensi.v6i2.6455>
- Awaludin, M., Maryam, S., & Firmansyah, M. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Kecil Dan Menengah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Konstanta*, 2(1), 156–174. <https://doi.org/10.29303/konstanta.v2i1.461>
- Azizah, S. S., Wulandari, H. K., & Dumadi. (2022). The Effect of Local Original Income, Regional Levies and Regional Tax Contributions on Regional Expenditures of Brebes Regency for the 2017–2021 Period. *JAMBU AIR: Journal of Accounting, Management, Business and International Research*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/jambuaire.v1i2.65>
- Bahasoan, A. N., Rahmatia, Tajibu, M. J., & Yunus, A. K. F. (2025). The Impact Of Fiscal Decentralization On Economic Growth: A Theoretical And Empirical Review. *International Journal of Environmental Sciences*, 11(13), 1076–1087. <https://doi.org/10.64252/7jtxts62>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2023). Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan Eviews). 1–236.
- Dahliah, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jesya*, 5(2), 2750–2761. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.896>
- Darmayanti, N., Africa, L. A., Damayanti, D., & Rikah, R. (2022). The Effect Of Locally Generated Revenue And Balancing Funds On The Level Of Regional Financial Independence. *Journal of Tourism Economics and Policy*, 2(3), 112–122. <https://doi.org/10.38142/jtep.v2i3.349>
- Desipradani, G., & Sucipto, H. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(2), 214. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v10i2.2075>
- DJPK. (2025). *TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) — Portal Data DJPK*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik

- Indonesia.
<https://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.273>
- Fajriati, M., Zulfatunnisa, Wafa, D. R., Heryaningrum, R. A., & Anwar, S. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Wacana Publik*, 15(02), 75–85.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *EQUITY*, 22(2). <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Halimah, P., Chaniago, S. R., Mustaruddin, M., & Wendy, W. (2025). The Impact Of Regional Original Revenue, General Allocation Fund, And Revenue Sharing Fund On Regional Expenditure In Regency/City In Central Java Province (2018-2022). *Jurnal Fokus Manajemen*, 5(2), 215–222. <https://doi.org/10.37676/jfm.v5i2.8317>
- Handayani, A. T., Suryati, T., Marsela, H. A., Luqmana, D., Anwar, S., Ekonomi, F., & Salatiga, I. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Bagi Hasil , Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *17(April)*, 41–57.
- Hutagalung, A. J., Sari, R. L., & Syafii, M. (2024). Flypaper Effect On The Influence Of General Allocation Funds And Original Regional Income On Regional Expenditure Of North Sumatra Province. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 7(1), 644–665.
- Iqbal, M., Abbas, T., & Ratna. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia (J-MIND)*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3422>
- Irfan Hamdani, Nugia Sri Nesta, Junita Rahmawati, & Faisal Hidayat. (2023). Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(3), 187–203. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i3.902>
- Irfan Syahroni, M. (2023). Analisis Data Kuantitatif. In *eJurnal Al Musthafa* (Vol. 3, Issue 3). <https://doi.org/10.62552/ejam.v3i3.64>
- Jannah, M., & Trisnaningsih, S. (2022). The Effect of Local Government Revenue (PAD), Special Allocation Funds (DAK), Revenue Sharing Funds (DBH), and General Allocation Funds (DAU) on Local Expenditures in the Surabaya City Government. *Balance Jurnal Ekonomi*, 18(02), 237–246.
- Jumaedi, M., & Adha, R. (2025). (*Studi Kasus Pada Tujuh Negara Asean*). 7(1), 33–43.

- Jung, H., & Kim, B. H. (2024). Foreign residents and local public expenditure: evidence from South Korea. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 29(1), 400–423. <https://doi.org/10.1080/13547860.2021.2024367>
- Juwari, Susilowati, D., & Sitinjak, C. A. D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36277/geoekonomi>
- Kustianingsih, N., Andriana, A., & Wardhaningrum, O. A. (2022). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Jawa Timur. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 58–70. <https://doi.org/10.37403/financial.v8i1.372>
- Madany, N., & Rais, Z. (2022). Regresi Data Panel dan Aplikasinya dalam Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Idx Lq45 Bursa Efek Indonesia. *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 4(2), 79–94. <https://doi.org/10.35580/variansiurnm28>
- Mahyu, A., & Andriyani, D. (2020). the Effect of Local Original Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Profit Sharing Funds on Regional Expenditures in Aceh Province. *Journal of Malikussaleh Public Economics*, 2(1), 16–22. <https://doi.org/10.29103/jmpe.v2i1.1497>
- Mursyidin, N., Annas, S., & Rais, Z. (2023). Pemodelan Regresi Data Panel terhadap Determinan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2020. *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 5(2), 94–103. <https://doi.org/10.35580/variansiurnm118>
- Paraswati, D., Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). Regional Financial Transformation: Analysis of the Influence of Public Funds on Regional Expenditures. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 4(2), 256–269. <https://doi.org/10.35313/ijem.v4i2.5575>
- Pratama, F. D. G., Susanto, B., & Farida. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Memperoleh Sustainability Reporting Award. *Unimma Journal*, 885–905.
- Priambodo, A. P., & Hidayat, N. W. (2024). Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal terhadap PDRB dan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jmkp.v8i1.2279>
- Purnasari, N., Sitompul, E., & Laowo, D. K. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2019. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1412–1425. <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/765>
- Purnomo, H. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d* (Issue January).

- Puspita, D., Pahlevi, M., Raharja, Y. M., Hadi, S., Baroto, A. L., Permana, A. W., & Rahayu, W. T. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*. Badan Kebijakan Fiskal.
- Rafi, R. N., & Arza, F. I. (2023). Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera . *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(1), 411–427. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.649>
- Rahayu, K., Aidid, M. K., & Rais, Z. (2023). Analisis Regresi Data Panel Pada Angka Partisipasi Murni (APM). *VARIANSI : Statistic and Its Application on Teaching and Research*, 5 (2)(2), 64–75. <https://doi.org/10.35580/variansi.nm113>
- Rahmatul Putra, N., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). The Role Of Local Own-Source Revenue In Supporting Fiscal Decentralization And Regional Development (Study of Regional Revenue Agency of West Sumatra Province). *Sustainability (STPP) Theory, Practice and Policy*, 3(1), 11–24. <https://doi.org/10.30631/sdgs.v1i1.1813>
- Rahula, S. A., & Bowo, P. A. (2021). The Effect of General Allocation Funds and Local Own-Revenue on Regional Government Expenditure in Central Java Province. *Indicators : Journal of Economic and Business*, 2(1), 257–266. <https://doi.org/10.47729/indicator.s.v2i1.63>
- Ridwan, R., & Nawir, I. S. (2021). *Ekonomi Publik*. Pustaka Pelajar. <https://www.mncsekuritas.id/>
- Rohan, S., & Asoka, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. *SURPLUS: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1). <http://ejournal.iba.ac.id/index.php/surplus>
- Roskaputri, F., Haryono, & Heniwati, E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Berajah Journal : Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri*, 4(5), 1113–1126. <https://doi.org/10.47353/bj.v4i5.399>
- Sabrina, M., & Widajantie, T. D. (2023). The Effect Of Regional Income On Regional Expenditures In Gerbangkertosusila. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 7(2), 446–458. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- Safa'ah, L. N., Rahmawati, E., & Novem, A. A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (EMBISS)*, 1(4), 288–298. <https://embiss.com/index.php/embiss>
- Salsabila, N. A., Juliarto, H. K., Syawal, A. F., & Nohe, D. A. (2022).

- Analisis Regresi Data Panel pada Ketimpangan Pendapatan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, Dan Aplikasinya*, 2, 241–253. <http://jurnal.fmipa.unmul.ac.id/index.php/SNMSA/article/view/860>
- Septriani. (2023). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(3), 1201. <https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1201>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Kedua). Alfabeta.
- UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. (2004). Republik Indonesia.
- Wardia, I., Ismiwati, B., & Wijimulawiani, B. S. (2024). Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2021). *Jurnal Oportunitas : Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 74–81. <https://doi.org/10.29303/oportunitas.v3i1.770>
- Wulandari, N., Hidayat, R. W., & Fuddin, M. K. (2023). Pengaruh DBH, DAU, DAK Terhadap Belanja Daerah di Kota, Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2021. *Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis*, 23(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/agribisnis.v23i2.4048>
- Yenada, K. B., & Muslimin. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Pada Provinsi Jawa Barat dan Banten. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1–15. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.4545>